

Dominasi Kelompok Elite dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Tenganan Pegringsingan

Aprigiyana¹, Piers Andreas Noak², Muhammad Ali Azhar³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: aprigiyana98@gmail.com¹, piersandreasnoak@unud.ac.id², aliazhar23mr@yahoo.co.id³

ABSTRACT

This study aims to find out how are the domination of indigenous elites in the tourism development in Tenganan Pegringsingan village. As the theoretical basis, this research uses the theory of Elite by Vilfredo Pareto as a frame of the problems in this study. The results of this study are: first, the Governing Elite is the most dominating group in the tourism development in Tenganan Village. The domination of the indigenous elite can be discovered in policies making related to tourism development without involving non-elite communities who only become the object of the policy. Second, the domination of the indigenous elite is interpreted as the result of traditional power in the indigenous elite of the Tenganan Village, which is able to bind its people in traditional way.

Keywords: *Elite, Tenganan Pegringsingan Village, Tourism, Power*

1. PENDAHULUAN

Pulau Bali menyimpan beragam daya tarik pariwisata yang bersumber pada keindahan alam serta kearifan lokal budaya masyarakatnya. Hal tersebut membuat daya tarik Bali menjadi tidak terbantahkan sebagai salah satu destinasi primadona di Indonesia bahkan Dunia.

Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, melansir data kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) ke Provinsi Bali pada bulan Mei 2018 tercatat mencapai 528.512 kunjungan. Data tersebut memberikan cerminan bagaimana padatnya pasar industri pariwisata di Bali. Dibalik padatnya kegiatan pariwisata tersebut, terdapat sebuah fenomena yang menarik. Dimana masifnya pasar pariwisata di Bali, tidak hanya disebabkan oleh gempuran pasar dari kaum pemilik modal semata. Melainkan justru beberapa desa adat yang memiliki keunikan

budaya, membuka diri sekaligus yang menarik industri pariwisata masuk ke desa.

Salah satu desa adat di Bali yang telah membuka diri bagi pasar pariwisata adalah Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Berdasarkan data statistik oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali pada tahun 2016, Desa Tenganan Pegringsingan menduduki posisi ke empat sebagai destinasi yang paling ramai dikunjungi di Kabupaten Karangasem.

Wega Dwi Rafika (2013:2) menerangkan bahwa masyarakat Tenganan dikategorikan sebagai salah satu kelompok masyarakat *Bali Aga (Bali Mula)*. Desa Tenganan menjadi salah satu desa tradisional yang hingga saat ini masih mempertahankan nilai adatnya baik tentang tata kehidupan masyarakat, sistem politik hingga seluk beluk mengenai pola pemukiman dan persoalan yang lainnya.

Penerapan tradisi adat yang masih kuat, ternyata tidak menjadi *filter* atau batasan dalam memasukan kegiatan pariwisata yang bersifat komersial ke dalam desa. Namun pada era saat ini, tradisi dan budaya tersebut yang justru menjadi modal untuk menarik wisatawan. Keunikan tradisi dan budaya seakan menjadi sekedar bahan-bahan dagangan untuk industri pariwisata. Seperti beberapa tradisi unik khas Desa Tenganan Pegringsingan, yang terus menerus dipromosikan untuk menarik wisatawan.

Berbagai kegiatan untuk menarik kunjungan wisatawan ke Desa Tenganan, merupakan bentuk keseriusan dalam melakukan pengembangan pariwisata. Langkah-langkah tersebut tidak lain

merupakan hasil dari kebijakan yang diambil oleh Desa Adat.

Kebijakan adat tersebut menunjukkan adanya dorongan dari kelompok masyarakat yang memiliki pengaruh dalam stratifikasi elite masyarakat. Pengaruh yang dimiliki oleh kelompok elite ini, mampu mendominasi arah kebijakan adat pada pengembangan pariwisata. Menempati posisi strategis dalam strata masyarakat adat, memungkinkan kelompok elite menyesuaikan kearifan budaya yang dimiliki untuk selanjutnya dikembangkan kedalam *frame* pariwisata. Dominasi dari kelompok *elite* adat Tenganan Pegringsingan, semakin dimungkinkan oleh terbatasnya regulasi adat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Elite

Menurut Vilfredo Pareto dalam Varma (2010:200), setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran-kehadiran mereka pada kekuasaan politik yang penuh. Merekalah yang mampu menduduki kekuasaan tertinggi dalam lapis masyarakat. Pareto juga percaya bahwa elit yang ada pada pekerjaan dan lapisan yang berbeda itu pada dasarnya datang dari kelas yang sama yaitu orang-orang yang kaya juga pandai dan mempunyai keunggulan dari masyarakat kebanyakan. Semakin besar keunggulan yang dimilikinya akan menjadikan yang bersangkutan mempunyai kuasa yang semakin besar pula. Kekuasaan yang besar akan membuat sekelompok individu tadi memiliki kemampuan dalam memainkan

peran dan pengaruhnya pada cabang kehidupan di mana yang bersangkutan memiliki keunggulan.

Terminologi elite menunjuk pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai keunggulan-keunggulan untuk menjalankan peran yang menonjol dan berpengaruh pada cabang kehidupan tertentu, seperti dalam bidang ekonomi serta politik. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa ada kemungkinan seseorang atau kelompok orang dengan keunggulan-keunggulan yang juga mampu memainkan peran yang menonjol dan berpengaruh besar pada lebih dari satu cabang kehidupan.

Kerangka Konseptual

Konsep Kekuasaan

Kekuasaan menurut Weber dalam Anthony Giddens (1987:23) didefinisikan sebagai 'kesempatan' bagi seseorang atau kelompok orang untuk mewujudkan dalam bentuk suatu aksi sosial, baik terhadap mereka yang menentang kehendak itu maupun terhadap yang mengikutinya. Poin penting dari definisi ini adalah kekuasaan tidak dimaknai sebagai pengaruh, tetapi lebih kepada tindakan bahkan paksaan dari seseorang. Tindakan seorang pemimpin politik selalu berorientasi pada tujuan dan motivasi dalam mendapatkan kekuasaan. Singkat kata, Weber memahami kekuasaan sebagai kemampuan seseorang untuk dapat memaksakan kehendaknya terhadap orang lain sekalipun ada perlawanan.

Konsep Pengembangan Pariwisata

Pengertian pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Muljadi (2009:10) menerangkan bahwa pariwisata adalah serangkaian kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau keluarga atau kelompok dari tempat tinggal asalnya ke berbagai tempat lain dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan. Kunjungan yang dimaksud bersifat sementara dan pada waktunya akan kembali ke tempat tinggal semula. Dengan maksud, kegiatan pariwisata adalah kegiatan bersenang-senang (*leisure*)

yang mengeluarkan uang atau melakukan tindakan konsumtif.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif menggunakan data primer dan sekunder, karena mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan dalam kaitannya dengan dominasi kelompok *elite* dalam pengembangan pariwisata di Desa Tenganan Pegringsingan.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dan studi literatur dengan unit analisis yaitu masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan. Dalam penelitian ini, teknik analisa data yang digunakan yakni reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Tenganan Pegringsingan

Desa Tenganan terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dengan luas wilayah 917,218 ha. Desa Tenganan atau dikenal dengan Tenganan Pegringsingan, merupakan salah satu dari sejumlah desa adat masyarakat *Bali Aga* yang ada di Pulau Bali. Desa Adat Tenganan Pegringsingan merupakan salah satu desa

Bali Aga / Bali Mula (Bali asli) yang sampai saat ini masih memegang adat-istiadatnya. Secara administrasi Desa Adat Tenganan Pegringsingan merupakan bagian dari wilayah Desa Dinas Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Desa Adat Tenganan Pegringsingan berjarak 68 kilometer dari kota Denpasar, sekitar 17 kilometer dari kota Amlapura dan 5 kilometer dari kawasan wisata Candi Dasa.

Konfigurasi Elite Adat Desa Tenganan

Dalam kehidupan sehari-hari, tidak begitu sulit untuk menemukan sekelompok individu yang mempunyai peran dan pengaruh lebih besar dibandingkan dengan kelompok lainnya. Peran dan pengaruh yang lebih besar dapat mereka lakukan karena keunggulan-keunggulan yang mereka miliki, tidak dimiliki kelompok atau individu lainnya, dan hal itu menjadi pembeda. Keunggulan tersebut dapat membuat mereka mengelola dan mengendalikan cabang kehidupan tertentu. Pada gilirannya, yang bersangkutan akan mampu memainkan peran dan pengaruhnya untuk menentukan corak dan arah bergulirnya roda kehidupan masyarakat.

Kelompok masyarakat yang memiliki keunggulan, menempatkan mereka pada posisi lapisan masyarakat atas. Merekalah yang mampu menduduki kekuasaan serta peran strategis dalam masyarakat. Dengan kapasitas yang dimiliki, mereka mampu mendominasi arah kehidupan masyarakat sesuai dengan kepentingan tertentu. Berjalannya pengembangan pariwisata didalam kultur masyarakat yang terbilang tradisional, menunjukkan adanya kelompok berpengaruh yang menuju arah tersebut. Mereka menjadi kelompok yang mampu

mengarahkan masyarakat untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk mendukung berjalannya kegiatan pariwisata.

Dalam masyarakat adat Tenganan Pegringsingan, juga terdapat kelompok yang memiliki peran serta pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Kelompok ini berpengaruh dalam mengendalikan kehidupan adat masyarakat Tenganan Pegringsingan. Jika dilihat dari pembahasan tentang teori *elite*, maka masyarakat yang memiliki keunggulan atas ekonomi, dan pendidikan, cenderung memberi dominasi yang lebih terhadap masyarakat lainnya. Namun hal menarik yang ditemukan dalam penelitian ini adalah lapisan masyarakat atas justru tidak berasal dari kalangan orang kaya atau orang pandai dengan latar belakang pendidikan tinggi. Bagi masyarakat adat Tenganan, status ekonomi, maupun pendidikan, sama sekali tidak mempengaruhi keputusan-keputusan adat, maupun kepentingan lainnya.

Dominasi Elite Adat sebagai Bentuk Kekuasaan Tradisional dalam Pengembangan Pariwisata Desa Adat Tenganan Pegringsingan

Pariwisata Tenganan Pegringsingan telah berkembang dengan begitu pesat. Bahkan menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Bali Tahun 2017, Desa Tenganan Pegringsingan menjadi salah satu tujuan wisata primadona di Kabupaten Karangasem. Keindahan alam, arsitektur bangunan, dan tradisi masyarakat kuno Bali, menjadi incaran bagi pelaku pariwisata. Beberapa kegiatan-kegiatan juga dilaksanakan untuk menarik minat serta

kunjungan wisatawan ke Tenganan. Upacara Ngusaba Sambah yang merupakan kegiatan ritual adat, kini telah dikemas ke dalam bentuk Festival. Kegiatan pariwisata yang dapat berlangsung pada masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan tradisi menunjukkan bahwa terdapat peran dari kelompok-kelompok berpengaruh. Kelompok ini mampu mengarahkan masyarakat untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian agar kegiatan pariwisata dapat berjalan. Selain itu, tujuan ini tentunya memiliki kepentingan tersendiri sehingga berusaha untuk tetap dilangsungkan.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, diketahui bahwa pengembangan pariwisata di Tenganan didominasi oleh kelompok *elite* masyarakat. Kondisi tersebut tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi oleh kelompok elite itu sendiri. Masyarakat yang telah mampu menjalankan tradisi perkawinan memang memiliki hak dalam mengakses kekuasaan politik adat. Namun disisi lain mereka harus menghadapi tantangan ekonomi. Masyarakat yang berstatus sebagai krama adat, berkewajiban untuk *ngayah* (mengabdikan) sepenuhnya untuk desa adat. Termasuk pengelolaan lahan, upacara adat, dan kepengurusan adat. Keterikatan atas masyarakat *krama* adat dengan tanggung jawab di desa, menyebabkan kesulitan untuk dapat berkarir atau mencari pekerjaan keluar desa. Disamping itu hasil dari sumber daya alam desa, yang selama ini menjadi hak *krama* adat saat ini dinilai sudah kurang memenuhi kebutuhan.

Pengembangan pariwisata di Desa Tenganan menjadi *alternative* ekonomi yang

menggiurkan. Letak desa yang berada dikawasan pariwisata Candi Dasa, memungkinkan adanya distribusi wisatawan. Disamping itu, kearifan lokal serta tradisi yang unik sebagai desa *Bali Aga*, membuat Desa Tenganan tidak kesulitan dalam menciptakan brand atau icon sebagai daya tarik wisata. Potensi inilah yang kemudian dimaksimalkan oleh kelompok *elite* masyarakat Tenganan melalui keuntungan peran serta posisi strategis yang dimiliki. Melalui pengembangan pariwisata, kelompok elite berkepentingan untuk dapat meningkatkan penghasilan desa yang selanjutnya berimbas pada peningkatan nilai ekonomi atas hak hasil sumber daya desa bagi kelompok elit.

Analisis Hasil Temuan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, strata politik dalam masyarakat, menentukan arah kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Tenganan Pegringsingan. Faktor lain seperti keunggulan ekonomi, maupun pendidikan tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Sehingga pada konteks masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan, semakin tinggi strata politik yang dimiliki, maka akan semakin dominan pula peran serta pengaruhnya di dalam masyarakat. Sedangkan kelompok masyarakat lainnya yang tidak memiliki kedudukan dalam strata politik, hanya menjadi objek dari kebijakan yang dikeluarkan.

Dalam strata elite di Desa Tenganan, *Governing Elite* merupakan kelompok *elite* yang paling mendominasi. Kelompok masyarakat pada strata ini merupakan kelas *elite* yang paling berpengaruh serta dominan dalam pengembangan pariwisata di Desa

Tenganan Pegringsingan. *Elite* pada posisi ini, memiliki keunggulan pada bidang stratifikasi politik. Dimana mereka menduduki jabatan politik tertinggi sebagai pemimpin adat. Pemimpin adat selain memiliki kedudukan politik yang berdasarkan pada tradisi, juga sekaligus memiliki wewenang dalam mengelola kehidupan masyarakat. Pada pengembangan pariwisata, dominasi kelompok elite ini mencakup hampir semua aspek pengembangan.

Pertama, pada aspek atraksi budaya, *governing elite* mampu menciptakan tatanan legal terhadap pandangan nilai kesakralan dari ritual upacara adat. Sehingga, kegiatan ritual adat dapat disesuaikan untuk menjadi bagian dari produk wisata yang ditawarkan oleh Desa Tenganan Pegringsingan. Kedua, pada aspek aksesibilitas, *governing elite* menjadi inisiator dalam penyediaan berbagai komponen untuk mempermudah arus distribusi wisata dapat mengakses lokasi Desa. Baik dengan pengadaan informasi petunjuk arah, hingga memberlakukan kebijakan pemberian *insentif* dan bonus kepada biro perjalanan yang mau mendistribusikan wisatawan ke Desa Tenganan Pegringsingan.

Ketiga, pada aspek pemenuhan fasilitas, *governing elite* menjadi aktor utama dalam pengembangan fasilitas penunjang wisata meskipun berdampak pada perubahan tata ruang yang telah ada. Keempat, dalam aspek kelembagaan, *governing elite* menjadi satu-satunya lembaga yang membidangi urusan adat dan sekaligus mengelola kegiatan pariwisata. Termasuk pada pengelolaan ketertiban, pengelolaan dana, dan kebijakan yang berkaitan dengan

pengembangan wisata. Dominasi ini, menyebabkan pengembangan pariwisata di Desa Tenganan Pegringsingan, kental dengan dorongan kepentingan dari sebagian kecil kelompok yang berpengaruh dalam masyarakat.

Adanya dominasi *elite* dalam pengambilan kebijakan, menjadikan relasi antar elite di Desa Tenganan cenderung berjalan searah. Kelompok elite masyarakat yang berada diluar struktur jabatan politik ternyata tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan arah kebijakan. Kondisi tersebut disebabkan oleh meskipun berada diluar struktur jabatan adat, kelompok *non governing elite* masih berada dibawah hirarki tingkatan senioritas perkawinan. Disamping itu, kesamaan kepentingan atas ekonomi melalui pengembangan pariwisata, semakin membuat relasi antar elite berjalan searah. Atas dasar kepentingan itu, *non governing elite*, turut memberi dominasi terhadap pengembangan pariwisata. Dimana dengan memberikan masukan serta sumbangan ide dalam penambahan fasilitas yang selanjutnya diperuntukan untuk kelompok *non governing elite* itu sendiri.

Sementara itu, dominasi elite terhadap kelompok *non elite* berimbas pada kedudukan kelompok non elite tersebut. Sistem stratifikasi elite Desa Tenganan yang tidak memungkinkan kelompok *non elite* untuk mengambil peran dalam desa cenderung membuat kelompok tersebut hanya menjadi objek kebijakan. Keberadaan *non elite* sejatinya bukanlah karena wawasan yang tidak memadai dalam keterlibatan pembuatan kebijakan. Namun atas nama tradisi, mereka memang sengaja tidak dilibatkan dalam

proses pembuatan keputusan kolektif. Meskipun memiliki jumlah yang lebih banyak, non elite tidak mampu mengakses kekuasaan atau bahkan mempengaruhi keputusan. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat yang berada pada strata *non elite*, hanya menjadi objek dari kebijakan yang dibuat. Kelompok *non elite*, hanya dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan atraksi wisata atau ritual adat yang membutuhkan massa dalam jumlah banyak. Namun dalam pemanfaatan fasilitas dan sumberdaya pariwisata, sudah dikuasai dan dimonopoli oleh kelompok *elite*.

Keadaan ini dimaknai sebagai hasil dari kekuasaan tradisional yang cenderung mengikat masyarakatnya melalui tradisi. Terlebih bagi masyarakat Bali yang masih menjunjung tinggi adat istiadatnya, tradisi merupakan hal yang terikat dengan agama dan harus dilaksanakan setiap komponennya. Sehingga masyarakat *non elite* secara sukarela bersedia ikut dalam kegiatan apapun di Desa Tenganan terkait dengan kepentingan daya tarik wisata. Bagi kelompok elite adat yang memiliki wewenang tradisional, lebih mudah memobilisasi masyarakat untuk meraih dukungan politis dengan memanfaatkan gagasan-gagasan tradisional. Dalam masyarakat tradisional seperti masyarakat Desa Tenganan, kekuasaan dilakukan dengan menggunakan basis adat istiadat sehingga lebih mudah untuk membangun solidaritas kelompok. Kepentingan kelompok sebagai masyarakat dalam tatanan elite pun dapat diterapkan melalui dominasi *elite* adat ini. Hal ini juga didukung oleh legitimasi yang dimiliki oleh *elite* adat sebagai hasil dari kepercayaan masyarakat itu sendiri terhadap adat dan

tradisinya. Melalui pemaparan di atas, perpaduan Teori *Elite* dan konsep kekuasaan tradisional ini tepat digunakan untuk membingkai penelitian terkait dominasi kelompok *elite* adat dalam pengembangan pariwisata Desa Tenganan Pegringsingan.

5. KESIMPULAN

Pada bagian ini penulis akan mengemukakan kesimpulan guna menjawab pertanyaan penelitian yang tercantum pada rumusan masalah pada bab sebelumnya. Berdasarkan hasil temuan dan analisa, dominasi kelompok *elite* adat, dalam pengembangan pariwisata di Desa Tenganan Pegringsingan dapat dipaparkan menjadi beberapa penjelasan sebagai berikut.

Pengembangan pariwisata di Desa Tenganan Pegringsingan berangkat dari dominasi kepentingan kelompok elite adat dengan faktor ekonomi sebagai dasar utama. Tanggung jawab masyarakat Desa Tenganan terhadap kelestarian tradisinya menimbulkan keterbatasan ruang gerak dalam mencari pekerjaan. Sehingga mendorong kelompok *elite* untuk menciptakan wacana pengembangan pariwisata agar kegiatan ekonomi dapat dilangsungkan tanpa meninggalkan desa.

Dalam pengembangan pariwisata Desa Tenganan Pegringsingan, *Governing Elite* menjadi kelompok yang paling mendominasi karena memiliki keunggulan dan kekuasaan yang melekat pada dirinya untuk mendorong arah kebijakan pengembangan pariwisata. Dengan kekuasaannya, *elite* adat kemudian menciptakan tatanan legal bagi kegiatan ritual adat untuk dijadikan atraksi wisata. Kebijakan ini juga dibarengi dengan pembenahan

fasilitas penunjang demi masuknya pangsa pasar pariwisata yang lebih luas. Walaupun kebijakan ini diputuskan oleh *governing elite* secara penuh, persamaan kepentingan ekonomi membuat kelompok *non governing elite* mulai dapat memberikan masukan serta sumbangan ide dalam penambahan fasilitas yang selanjutnya diperuntukan untuk kelompok *non governing elite* tersebut. Hal ini memungkinkan karena kelompok *non governing elite* masih berada dibawah hirarki tingkatan senioritas perkawinan.

Kelompok *non elite*, tidak dapat berperan dalam pengambilan keputusan dan hanya dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan atraksi wisata atau ritual adat yang membutuhkan massa dalam jumlah banyak. Keadaan ini dimaknai sebagai dampak kekuasaan tradisional dalam bentuk dominasi sosio-kultural yang dimiliki oleh elit adat di Desa Tenganan yang mampu mengikat masyarakat secara tradisi. Sehingga, walaupun tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan kolektif, masyarakat *non elite* secara sukarela bersedia ikut dalam kegiatan apapun di Desa Tenganan terkait dengan kepentingan daya tarik wisata. Hal ini juga didukung oleh legitimasi yang dimiliki oleh *elite* adat sebagai hasil dari kepercayaan masyarakat itu sendiri terhadap adat dan tradisinya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Giddens, A. (1987). Max Wabber 'Economic and society', *Perdebatan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan, dan Konflik*. Jakarta : Rajawali Pers
- Muljadi, A. (2009). *Kepariwisata dan Perjalanan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Varma, S. (1987). *Teori Politik Modern*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Wega Dwi Rafika. (2013). *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Adat Tenganan Pegringsingan, 1960-1990*. Hasil Penelitian Mahasiswa, Jurusan Sejarah Universitas Jember

Sumber Lain

Badan Pusat Statistik (BPS) Bali